

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Achmad. 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*. Kencana. Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Asmarawati, Tina. 2014. *Sosiologi Hukum: Petasan ditinjau dari Persepektif Hukum dan Kebudayaan*. Deepublish. Yogyakarta.
- Bactiar. 2015. *Problematisasi Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU terhadap UUD*. Raih Asa Sukses. Jakarta
- Chen, Albert H. Y.. 2000. *The Interpretation of the Basic Law--Common Law and Mainland Chinese Perspectives*. Hong Kong Journal Ltd.. Hong Kong.
- Fatmawati. 2006. *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang dimiliki Hakim d alam Sistem Hukum Indonesia*. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Forowicz, Magdalena. 2010. *The Reception of International Law in the European Court of Human Rights*. Oxford University Press, New York.
- Gardner, Bryan A. (ed). 2000. *Black's Law Dictionary*. West Publishing Company. St. Paul. Minnesota.
- Harahap, Yahya. 2006. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono. S.H.. M.C.L Wakil Ketua MK*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
- HS, Salim dan Erlies Septianan Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cetakan 1. RajaGrafindo. Jakarta.
- Ibrahim, Johni. 2007. *teori & Metodologi Penelitia Hukum Normatif*. cetakan III. Bayumedia Publishing. Malang.
- Kelsen, Hans. 1973. *General Theory Theory of Law and State*. Russel & Russel. New York.

- \_\_\_\_\_. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung. Nusa Media.
- Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
- Martitah. 2013. *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislator ke Positive Legislator?*. Konstitusi Pers (Konpers). Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum. Kencana*. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Patton, Gw. 1972. *Textbook of Jurisprudence*. English Language Book Society. Oxford University Press. London.
- Rahayu, Esmi Warassih Puji. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Suryandaru Utama. Semarang.
- Ridwan Syahrani. 1988. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Pustaka Kartini. Jakarta.
- Rubini. dan Chaidir Ali. 1974. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Alumni. Bandung.
- Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. PT Grasindo. Jakarta.
- Semma, Mansyur. 2008. *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik*. Yayasan Obor. Jakarta.
- Siahaan, Maruarar. 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Konstitusi Press. Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2*. Sinar Grafika. Jakarta
- Slomp, Hans. 2011. *Europe, a Political Profile: An American Companion to European Politics, Volume I*, ABC-CLIO, Denver.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum*. Bina Cipta. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.

- \_\_\_\_\_. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Faktor-Faltor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta.
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sumaryono, E. 1993. *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Mandar Maju. Bandung
- Suriasumantri, Jujur S. 1986. Ilmu dalam Perspektif Moral. Sosial dan Politik: Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini. Gramedia. Jakarta.
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI. 2007. *Ilmu & Aplikasi Pendidikan: Bagian 1 Ilmu Pendidikan Teoritis*. Imperial Bhakti Utama. Bandung.

## B. Artikel Jurnal

- Ali, Mahrus. "Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 7. No. 1. Februari 2010.
- Asy'ari, Syukri, dkk. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 10. No. 4. Desember 2013.
- Faiz, Pan Mohamad. "Relevansi Doktrin Negative Legislator". *Majalah Konstitusi*. No. 108. Februari 2016.
- Lailam, Tanto. Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Yudisial*. Vol. 21. No. 1. Juni 2014.
- Laksono, Fajar, dkk. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Terkait Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12. No. 3. September 2015.

- \_\_\_\_\_. “Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/Puu-X/2012 Tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) / Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 10. No. 4. Desember 2013.
- Limbach, Jutta. The Concept of the Supremacy of the Constitution. dalam “*The Modern Law Review*”. Vol. 64. No. 1. Januari 2001.
- Lubis, M. Solly. Mahkamah Konstitusi dan Putusannya: Antara Harapan dan Kenyataan *Jurnal Konstitusi*. Vol. 3. No. 4. Desember 2006.
- Muda, Iskandar dan Muhammad Kadafi. Penerapan Konsep Hukum Pembangunan Ekonomi dalam Upaya Pencegahan Eksploitasi Pekerja Alih Daya: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. *Jurnal Yudisial*. Vol. 6. No. 1. April 2013.
- Nurbaningsih, Enny. Implikasi Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Alternatif Model Hubungan Kelembagaan Terkait Pembentukan Undang-Undang, *Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 1, Februari 2015.
- Nurhayati, Syara. Mahkamah Konstitusi Sebagai *Positive Legislator* dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *JOM Fakultas Hukum*. Vol. 2. No. 2. Oktober 2015.
- Pengantar Redaksi. *Jurnal Konstitusi* Vol. 10. No. 1. Maret 2013.
- Pribadi, Unan. “Tinjauan Kritis Tentang Pengaturan Kembali Substansi Ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Yang Sudah Dinyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Oleh Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 11. No. 2. Juni 2014.
- R., Wafia Silvi Dhesinta, dkk. 2014. *Rasio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-X/2012 Terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pembubaran Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional)*
- Siallagan, Haposan. “Masalah Putusan Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang”. *Mimbar Hukum*. Vol. 22. No. 1. Februari 2010.
- Syahrizal, Ahmad. Problem Implementasi Putusan MK. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 4. No 1. Maret 2007.

### C. Jurnal, Penelitian dan Makalah

- Asshiddiqie, Jimly. tanpa tahun. *Penegakan Hukum*. Makalah.
- Aprillia, Ciline Ria. “Problematika Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Tentang Peninjauan Kembali Lebih dari Satu kali”. Artikel.
- Asy’ari, Syukri, dkk. “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)”. Laporan penelitian
- Daryatno, Deni. Tanpa Tahun, Tinjauan Yuridis Tentang Legalitas Executive Review Terhadap Peraturan Daerah (Perda), Jurnal
- Fadel. 2012. Tinjauan Yuridis Prinsip Ultra Petita oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif di Indonesia. Skripsi.
- Gaffar, Janedri M.. 2011. Kedudukan. Fungsi. dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Makalah.
- Indonesia Legal Roundtable. 2015. *Indeks Negara Hukum Indonesia 2014*. Laporan Penelitian
- Indrahayu, Dirwan. 2015. *Konflik Ibukota Di Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Sam Ratulangi.
- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2015, *Laporan Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ke Provinsi Papua pada Masa Reses Persidangan II Tahun Sidang 2014-2015*, Laporan Kerja.
- Kongres Pancasila IV. 2012. *Prosiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menengakkan Konstitusionalitas Indonesia*. Pusat Studi Pancasila UGM . Yogyakarta.
- Lysa Angrayni. tanpa tahun. *Sanksi Administratif Versus Sanksi Pidana: Suatu Problematika Dalam Penegakan Hukum Kehutanan*. Makalah. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
- MD, Mohammad. Mahfud. 2008. Rambu Pembatas Mahkamah Konstitusi. Makalah.
- \_\_\_\_\_. 2011. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Makalah.

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas. 2010. *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*. Penelitian.

Safa'at, Ali. tanpa tahun. Kekuatan Mengikat dan Pelaksanaan Putusan MK. Makalah untuk Universitas Brawijaya Malang.

Wells, Philip, dkk. 2012. Kajian atas Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 45/PUU-IX/2011 tentang Kawasan Hutan: Dampak terhadap Hutan. Pembangunan. dan REDD+. Jurnal penelitian.

Yuliandri. 2007. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik Dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Berkelanjutan* (Ringkasan Disertasi). Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Surabaya.

#### **D. Majalah**

Butt, Simon. "Posisi Hukum Islam di Indonesia berdasarkan Tafsir MK". *Majalah Konstitusi*. No. 91. September 2014.

Huda, Miftakhul. Erga Ormes. *Majalah Konstitusi*. No. 45. Oktober 2010.

#### **E. Surat Kabar**

Kendari Pos, *Bupati Butur Didesak Mundur: Polemik Ibukota Diributkan lagi*, Kendari Pos 21 Agustus 2013

Bhakti, Ikrar Nusa, *Power Tends to Corrupt*, Seputar Indonesia, 24 Agustus 2010.

#### **F. Internet**

Antara Jateng. Pelaksanaan Putusan MK Harus Segera Dilaksanakan. <http://jateng.antaranews.com/detail/pelaksanaan-putusan-mk-harus-segera-dilaksanakan.html>, diakses pada tanggal 4 Januari 2016 Pukul 20.00 WIB.

Badan Lingkungan Hidup D.I. Yogyakarta. Implikasi Hukum Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, <http://blh.jogjaprovo.go.id/2015/06/implikasi-hukum-pembatalan-undang-undang-nomor-7-tahun-2004-tentang-sumber-daya-air/>. diakses pada tanggal 4 Januari 2016 Pukul 20.00 WIB.

Gaffar, Janedri M. Etika Penegakan Hukum. <http://nasional.sindonews.com/read/975457/18/etika-penegakan-hukum-1426130757>, diakses pada tanggal 4 Desember 2015 Pukul 22.00 WIB.

Hukum Online, Arti Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54f3260e923fb/arti-putusan-niet-ontvankelijke-verklaard no/](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54f3260e923fb/arti-putusan-niet-ontvankelijke-verklaard-no/). Diakses pada tanggal 15 Mei 2016 pukul 16.00.

Hukum Online, Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3157/arti-gugatan-dikabulkan,-ditolak,-dan-tidak-dapat-diterima>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2016 Pukul 14.00 WIB.

Isra, Saldi. *Negative Legislator*, <http://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/302-negative-Legislator.html>, diakses pada tanggal 14 Maret 2016 Pukul 20.00 WIB.

Kemenkumham, *Proses Pembentukan Undang-Undang*, [http://peraturan.go.id/welcome/index/prolegnas\\_pengantar.html](http://peraturan.go.id/welcome/index/prolegnas_pengantar.html), diakses pada tanggal 4 Maret 2016 pukul 19.00 WIB.

Kppod, *Daftar Nama Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Papua Barat*, <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNhNvT1vvNAhVIOo8KHfvtDSAQFggBMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kppod.org%2Fdatapdf%2Fpejabat%2Fdf-gub-bup-walkot-indo-2014.pdf&usg=AFQjCNHoExep9ye5B7DhVB5MN1x2CYRzgw>, diakses pada tanggal 20 November 2015 Pukul 19.00 WIB.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Gubernur Papua Barat dan Bupati Maybrat Diminta Patuhi Putusan MK*, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=12128#.VzGb1-Sktf4>, diakses pada tanggal 25 Februari 2016 Pukul 17.00 WIB.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Lagi, UU MD3 dan UU P3 Terkait Kewenangan DPD Diujikan ke MK* <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=7727#.VzGW0-Sktf4>, diakses pada tanggal 25 Februari 2016 Pukul 17.00 WIB.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pemerintah: UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Tidak Hidupkan Kembali Sistem Zona* <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=12947#.VzFksuSktf4>, diakses pada tanggal 30 Maret 2016 Pukul 16.00 WIB.



Siahaan, Maruarar. *Checks And Balances Dan Judicial; Review Dalam Legislasi di Indonesia*. <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/333/checks-and-balances-dan-judicial-review-dalam-legislasi-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2016 Pukul 20.00 WIB.

Sultralive, *Penuhi Tuntutan Rakyat, Abu Hasan Kembalikan Pusat Pemerintahan Butur*, <http://sultralive.com/penuhi-tuntutan-rakyat-abu-hasan-kembalikan-lbukota-butur/>, diakses pada tanggal 30 April 2016 Pukul 20.00 WIB.

The Encyclopedia Britannica. *Judial Review*. <http://www.britannica.com/topic/judicial-review>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2015 pukul 17.30 WIB.

The Law Dictionary, *What is Judicial Review?*, <http://thelawdictionary.org/judicial-review/>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2015 pukul 17.30 WIB.

#### G. Produk Hukum

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Pertama smpa Ke-empat (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 11-14).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836)..

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924).

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4969).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 18/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 111/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 19/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 66/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 24/PUU-XI/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 72/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 79/PUU-XI/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 94/PHP.BUP-XIV/2016 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Sulawesi Tenggara Tahun 2015.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.